



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 28 Agustus 2019
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.49 WIB s.d 14.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: Membahas RKA-K/L Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam nota Keuangan RAPBN TA 2020
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.49 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah membahas RKA-K/L Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020.
3. Ketua Rapat mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap alokasi anggaran dalam RAPBN TA 2020 sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

KEMENTERIAN	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2020	KEKURANGAN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	137.488.176.494	120.217.535.952	17.270.640.542

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengupayakan penambahan pada alokasi anggaran TA. 2020 untuk ganti rugi tanah dan bangunan bagi pengusaha korban bencana lumpur Sidoarjo di peta area terdampak yang belum diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kabupaten/kota tertentu, akan disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi V DPR RI sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian Rapat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020 serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Dengar Pendapat mendatang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 28 Agustus 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,



FARY DJEMY FRANCIS